



► KOPERASI MERAH PUTIH

Pembangunan KMP Terganjil Lahan

UMBULHARJO—Pengembangan Koperasi Merah Putih (KMP) di Kota Jogja menghadapi kendala aturan luas lahan minimal 600 meter persegi yang dinilai sulit dipenuhi. Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, meminta relaksasi kebijakan agar program ekonomi kerakyatan tersebut tetap bisa berjalan.

Ariq Fajar Hidayat
ariq@harianjogja.com

Permintaan tersebut disampaikan langsung kepada Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, saat kunjungan kerja di Kota Jogja, Minggu (1/3). Hasto menjelaskan karakter wilayah perkotaan dengan kepadatan permukiman tinggi serta harga tanah yang mahal membuat standar luas lahan menjadi tantangan utama implementasi KMP.

Hasto menilai kondisi tersebut membutuhkan kebijakan khusus berupa pelonggaran aturan sehingga Pemkot dapat memanfaatkan aset lahan yang tersedia. Dia menyebut sejumlah lokasi berukuran lebih kecil sebenarnya sudah teridentifikasi dan berpotensi digunakan jika persyaratan luas lahan dapat disesuaikan.

"Saya mau menawar kalau boleh kurang dari 600 meter. Itu tawaran pertama. Kalau boleh kurang dari 600 meter persegi, kami akan mencoba mengidentifikasi karena sebelumnya sudah ada lahan seluas 200 dan 400 meter persegi, berarti bisa digunakan untuk membangun KMP," ujar Hasto, Minggu.

Selain persoalan lahan Koperasi Merah Putih, Hasto juga menekankan pentingnya model bisnis koperasi yang mandiri dan berorientasi keuntungan agar tidak membebani anggaran kelurahan. Ia berharap pinjaman

► Kepadatan serta harga tanah yang mahal membuat standar luasan lahan menjadi tantangan implementasi KMP.

► Hasto berharap pinjaman modal dapat dikembalikan melalui hasil bisnis, bukan dari dana kelurahan.

modal usaha dapat dikembalikan melalui hasil bisnis yang produktif, bukan dari dana pemerintah kelurahan. "Harapan saya pinjaman uang Rp3 miliar itu dicicil dari hasil bisnis, bukan anggaran dari kelurahan. Kasihlah pemerintah kelurahan karena sudah enggak ada apa-apa," tuturnya.

Pemerintah Kota Jogja telah memetakan sejumlah sektor usaha potensial yang sesuai karakter wilayah perkotaan, mulai dari produksi pupuk organik hingga jaringan ritel skala kecil. Produksi pupuk organik dinilai memiliki pasar stabil karena kebutuhan perawatan taman kota yang terus berlangsung setiap hari.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto memberikan sinyal dukungan untuk membawa usulan relaksasi aturan lahan KMP ke tingkat kementerian terkait. Ia menilai kebutuhan fasilitas koperasi di perkotaan berbeda dengan wilayah perdesaan yang biasanya membutuhkan ruang lebih luas untuk alat pertanian berat. "Misalnya kalau di dusun ada penggilingan, ada bengkel traktor dan sebagainya, di kota enggak ada. Jadi lahan bisa diperkecil. Saya rasa mestinya bisa," ujar Titiek.

Penyesuaian regulasi lahan Koperasi Merah Putih diharapkan mampu mempercepat penguatan ekonomi mandiri di kawasan perkotaan seperti Kota Jogja tanpa terhambat aturan teknis yang kurang sesuai kondisi lapangan.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Mei 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005